

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

## **EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BOGOR**

Torang Parulian Malau<sup>1</sup>Atik Rochaeni<sup>2</sup>Rira Nuradhawati<sup>3</sup>*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### **Abstract**

*This study analyzes the implementation of the Military Operations Other Than War (OMSP) policy in Papua, focusing on the Indonesian Army's (TNI AD) assistance to local governments. OMSP represents a non-combat military operation that integrates defense and development functions in maintaining regional stability and strengthening state presence in remote and conflict-prone areas. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with military officers, local government officials, and community leaders, supported by field observations and document analysis. The findings reveal that OMSP implementation in Papua has been effective in enhancing local security and supporting public welfare, although several challenges remain. Key obstacles include difficult geographical conditions, limited communication infrastructure, weak interagency coordination, and social distrust among local communities. Nevertheless, TNI AD has taken adaptive measures such as strengthening territorial management, enhancing civil-military cooperation, digitalizing communication systems, and promoting a humanistic approach through community-based programs. The study concludes that the success of OMSP depends on four key dimensions: organizational capability, information management, stakeholder support, and resource distribution. Practically, this research provides insights into optimizing non-war military operations as instruments of nation-building and collaborative governance in Indonesia's frontier regions.*

**Keywords:** *Military Operations Other Than War (OMSP), Public Policy Implementation, Papua, Civil-Military Cooperation, Defense Governance*

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan salah satu mandat strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. OMSP menjadi bentuk kehadiran militer dalam tugas-tugas nonpertempuran yang bertujuan mendukung pemerintah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat ketahanan masyarakat, serta melindungi keselamatan bangsa dan negara dari ancaman nonmiliter. Di antara bentuk OMSP yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia, implementasi di Papua menjadi salah satu yang paling kompleks karena melibatkan tantangan geografis, sosial, dan politik yang khas.

Wilayah Papua memiliki karakteristik tersendiri dalam konteks kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Selain kondisi geografisnya yang sulit dijangkau dan infrastrukturnya terbatas, Papua juga menghadapi dinamika sosial yang tinggi akibat perbedaan etnis, budaya, serta kondisi ekonomi yang belum merata. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan OMSP di Papua bukan hanya merupakan tugas pertahanan, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung kebijakan pembangunan dan pemerintahan daerah. TNI, khususnya TNI Angkatan Darat (TNI AD), memiliki peran vital dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan wilayah.

Implementasi OMSP di Papua juga memiliki dimensi kemanusiaan dan sosial yang menonjol. Operasi ini tidak hanya berfokus pada pengamanan wilayah, tetapi juga mencakup misi-misi seperti bantuan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan, serta pendampingan terhadap aparat sipil dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, di balik berbagai keberhasilan tersebut, implementasi OMSP sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis ekstrem, minimnya infrastruktur, serta perbedaan persepsi antara aparat militer dan sipil dalam memahami ruang lingkup tugas perbantuan.

Kondisi Papua yang dinamis juga menuntut adanya kebijakan implementatif yang adaptif dan responsif. OMSP di wilayah ini tidak dapat dijalankan dengan pendekatan militeristik semata, melainkan harus berorientasi pada pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan yang menekankan kerja sama erat antara TNI dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

pemerintah daerah. Dalam praktiknya, peran TNI AD sering kali meluas pada fungsi pembinaan teritorial, yang mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran bela negara, serta pendampingan dalam penyediaan layanan publik di daerah terpencil.

Dalam kerangka kebijakan publik, implementasi OMSP dapat dianalisis sebagai sebuah proses kebijakan yang kompleks, karena melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Warwick (dalam Subarsono, 2005) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Keempat dimensi ini saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam konteks OMSP di Papua, teori ini menjadi sangat relevan karena pelaksanaan operasi memerlukan kemampuan organisasi militer yang tangguh, informasi lapangan yang akurat, dukungan masyarakat dan pemda yang kuat, serta pembagian peran yang proporsional antarinstansi.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa pelaksanaan OMSP di Papua telah memberikan dampak positif, terutama dalam mendukung stabilitas wilayah dan membantu pemerintah daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik di wilayah yang sulit dijangkau. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi, perbedaan persepsi antara aparat TNI dan sipil, serta tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat di daerah konflik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan OMSP masih membutuhkan evaluasi komprehensif agar efektivitasnya dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama: Bagaimana implementasi kebijakan operasi militer selain perang di wilayah Papua? Pertanyaan turunan yang mendasari kajian ini mencakup dua hal penting lainnya, yaitu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, serta upaya yang dilakukan oleh TNI AD untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi kebijakan OMSP di wilayah Papua, dengan fokus pada perbantuan TNI AD kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat literatur implementasi kebijakan publik di bidang pertahanan nonperang, sementara secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi TNI AD dan pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergitas operasi di masa mendatang.

#### *Kerangka Teori*

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), implementasi merupakan proses yang melibatkan penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional oleh lembaga-lembaga publik dan aktor-aktor yang terlibat. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks pertahanan negara, implementasi kebijakan seperti Operasi Militer Selain Perang (OMSP) menjadi tantangan tersendiri karena bersinggungan dengan aspek keamanan, sosial, politik, dan kemanusiaan secara bersamaan.

OMSP merupakan bentuk adaptasi peran TNI dalam mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional di luar konteks peperangan. Sejak disahkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, OMSP mencakup 14 jenis tugas, mulai dari penanggulangan bencana alam, pemberantasan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, hingga perbantuan kepada pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan masyarakat. Dalam implementasinya di Papua, OMSP bukan sekadar kegiatan militer, melainkan bentuk kolaborasi antara kekuatan pertahanan dengan kekuatan sipil untuk menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif bagi pembangunan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Namun, seperti halnya kebijakan publik pada umumnya, keberhasilan implementasi OMSP sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat operasional. Menurut Warwick (dalam Subarsono, 2005:99), terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah Papua, khususnya dalam konteks perbantuan kepada pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang kompleks melalui pemaknaan terhadap realitas empiris di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dengan mempertimbangkan konteks dan interaksi aktor di dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menggambarkan pelaksanaan OMSP, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mendukung implementasinya berdasarkan teori Warwick (dalam Subarsono, 2005), yang meliputi dimensi kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif. Informan utama meliputi pejabat dan perwira TNI AD yang bertugas dalam operasi OMSP di Papua, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat lokal, serta perwakilan lembaga sipil yang terlibat dalam kegiatan kolaboratif antara militer dan pemerintah daerah. Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan informan mengenai pelaksanaan OMSP dan sinerginya dengan kebijakan pembangunan daerah. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di beberapa lokasi kegiatan OMSP yang melibatkan kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah, seperti

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

kegiatan pembinaan teritorial, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

## **PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah Papua memiliki urgensi strategis yang sangat tinggi bagi kepentingan nasional Indonesia. Papua bukan hanya wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks, tetapi juga daerah yang memiliki dinamika sosial, politik, dan keamanan yang unik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Tahun 2023, luas wilayah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan mencapai lebih dari 300.000 km<sup>2</sup> dengan topografi bergunung dan akses transportasi terbatas, sehingga distribusi pembangunan dan pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah serta memperlemah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sipil, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

### 1. implementasi kebijakan operasi militer selain perang di Wilayah Papua

#### a. Dimensi Kemampuan Organisasi

Dalam perspektif Warwick (dalam Subarsono, 2005), kemampuan organisasi mencerminkan kapasitas institusi pelaksana kebijakan untuk menjalankan fungsi, mandat, dan tujuan yang telah dirumuskan. Kemampuan ini meliputi unsur sumber daya manusia, sistem komando, sarana dan prasarana, serta fleksibilitas struktur organisasi dalam menghadapi kompleksitas lingkungan operasional. Dalam konteks pelaksanaan OMSP di Papua, kemampuan organisasi menjadi penentu utama keberhasilan operasi, mengingat kondisi medan yang ekstrem, situasi sosial yang dinamis, dan luasnya wilayah tanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan organisasi TNI AD di Papua cukup solid dan terstruktur. Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari merupakan komando utama yang membawahi satuan-satuan pelaksana hingga ke tingkat Koramil dan Babinsa. Struktur komando berlapis ini memungkinkan pelaksanaan OMSP dijalankan dengan pola hierarkis yang efektif, di mana perintah dan pelaporan dapat berjalan cepat dan berkesinambungan. Wawancara dengan salah satu pejabat staf Kodam XVII/Cenderawasih menyebutkan bahwa sistem territorial approach yang diterapkan TNI menjadi landasan dalam membangun komunikasi, pengawasan, dan koordinasi dengan masyarakat serta pemerintah daerah.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kemampuan organisasi TNI AD dalam pelaksanaan OMSP di Papua telah menunjukkan tingkat kesiapan dan adaptasi yang tinggi, terutama dalam penguatan komando teritorial dan peran sosial kemasyarakatan. Namun, keterbatasan sarana, medan operasi yang sulit, serta ketimpangan logistik antarwilayah menjadi faktor yang masih perlu mendapatkan perhatian. Kesimpulan sementara: kemampuan organisasi merupakan kekuatan utama implementasi OMSP, tetapi efektivitasnya masih ditentukan oleh kemampuan mengatasi hambatan geografis dan logistik.

#### b. Dimensi Informasi

Dimensi informasi menurut Warwick mencakup kemampuan organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan informasi yang relevan dan akurat bagi proses pengambilan keputusan. Informasi yang baik akan menentukan efektivitas strategi kebijakan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan situasi. Dalam OMSP di Papua, dimensi ini menjadi krusial karena medan operasi yang luas dan kompleks menuntut akurasi tinggi dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan operasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNI AD memiliki sistem pengelolaan informasi yang relatif baik, terutama melalui struktur intelijen teritorial dan jaringan Babinsa di setiap kampung. Data dan laporan lapangan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

dikumpulkan secara rutin untuk memantau kondisi keamanan, aktivitas masyarakat, serta potensi ancaman. Informasi ini tidak hanya digunakan untuk operasi keamanan, tetapi juga menjadi dasar bagi kegiatan sosial, seperti penyaluran bantuan kemanusiaan, pembangunan sarana umum, dan pendampingan ekonomi masyarakat. Wawancara dengan salah satu perwira pelaksana OMSP menyatakan bahwa koordinasi informasi dengan pemerintah daerah dilakukan melalui pertemuan rutin dalam forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk memastikan keselarasan kegiatan di lapangan.

#### c. Dimensi Dukungan

Faktor dukungan dalam teori Warwick menekankan pentingnya legitimasi dan penerimaan sosial terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dukungan yang kuat dari aktor internal maupun eksternal merupakan prasyarat agar kebijakan dapat berjalan efektif. Dalam konteks OMSP di Papua, dukungan mencakup kerja sama antara TNI AD dengan pemerintah daerah, lembaga sipil, serta masyarakat lokal.

Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan OMSP di Papua mendapat dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat dari adanya integrasi kebijakan OMSP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kerja sama formal antara Kodam XVII/Cenderawasih dan pemerintah provinsi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dukungan juga datang dari masyarakat di daerah yang merasakan manfaat langsung dari kegiatan OMSP, seperti pelayanan kesehatan gratis, bantuan sembako, pembangunan fasilitas publik, serta kegiatan pendidikan di daerah terpencil.

#### d. Dimensi Pembagian Potensi

Dimensi terakhir, pembagian potensi, menggambarkan sejauh mana pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab antaraktor kebijakan berjalan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

secara proporsional dan sinergis. Dalam OMSP, keberhasilan sangat bergantung pada sinergi antara TNI sebagai pelaksana operasi dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan sipil. Pembagian potensi yang tidak jelas akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi menimbulkan konflik peran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian potensi dalam pelaksanaan OMSP di Papua telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya koordinasi formal antara Kodam dan pemerintah daerah dalam setiap kegiatan. Misalnya, dalam pelaksanaan program bantuan logistik dan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah berperan sebagai penyedia anggaran dan fasilitator, sedangkan TNI bertanggung jawab pada aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam kegiatan tanggap bencana, peran ini bahkan lebih jelas, di mana TNI menjadi garda terdepan dalam mobilisasi personel dan peralatan, sedangkan pemerintah daerah menangani aspek administrasi dan pascakrisis.

## 2. Kendala yang dihadapi dan Upaya dalam implementasi kebijakan operasi militer selain perang di Wilayah Papua

Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah Papua memiliki tantangan yang cukup besar karena situasi geografis, sosial, dan politik yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Walaupun pelaksanaan OMSP oleh TNI AD telah membawa manfaat bagi stabilitas keamanan dan pembangunan daerah, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Namun, di sisi lain, TNI AD juga telah berupaya melakukan langkah-langkah strategis dan adaptif untuk mengatasinya agar pelaksanaan OMSP tetap berjalan efektif dan memberi hasil nyata bagi masyarakat.

Kendala pertama yang paling menonjol adalah kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Papua memiliki wilayah yang luas, bergunung, dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

banyak daerah yang sulit dijangkau. Kondisi ini sering menyebabkan keterlambatan logistik dan sulitnya mobilisasi personel ke wilayah terpencil. Untuk mengatasi kendala tersebut, TNI AD melakukan upaya adaptasi operasional, seperti penggunaan jalur udara secara intensif, penempatan satuan tempur dan teritorial di daerah strategis, serta mengoptimalkan peran Babinsa dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, TNI juga mengembangkan pola operasi teritorial terpadu, di mana setiap kegiatan militer disinergikan dengan kebutuhan pembangunan daerah agar logistik dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien.

Kendala kedua berkaitan dengan minimnya jaringan komunikasi dan informasi antarinstansi. Banyak daerah di Papua yang masih belum terjangkau sinyal komunikasi dan jaringan internet, sehingga laporan lapangan sering kali terlambat diterima oleh komando atas. Hal ini menyebabkan koordinasi antara satuan TNI dan pemerintah daerah menjadi lambat, terutama saat terjadi situasi darurat. Untuk mengatasi kendala tersebut, TNI AD meningkatkan sistem komunikasi berbasis satelit dan memperkuat jaringan radio HF di pos-pos terpencil.

Kendala berikutnya adalah faktor sosial dan budaya masyarakat Papua. Sebagian masyarakat masih memiliki rasa tidak percaya kepada aparat militer akibat pengalaman masa lalu, dan hal ini diperparah oleh adanya propaganda negatif dari kelompok separatis. Situasi ini membuat beberapa masyarakat enggan berinteraksi dengan aparat atau terlibat dalam program yang dijalankan oleh TNI. Untuk mengatasi hal ini, TNI AD melaksanakan pendekatan sosial dan kultural melalui program pembinaan teritorial. Babinsa ditugaskan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta pemuda dalam setiap kegiatan sosial. Program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) juga terbukti efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata, seperti pembangunan jembatan, fasilitas umum, dan pelayanan kesehatan gratis.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Kendala keempat adalah koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Dalam beberapa kasus, program OMSP berjalan bersamaan dengan kegiatan pemerintah daerah tanpa adanya sinkronisasi, sehingga menyebabkan tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya. Sebagai upaya mengatasinya, TNI AD bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi melalui forum Forkopimda dan perencanaan bersama antarinstansi.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan kesejahteraan dan fasilitas bagi personel TNI yang bertugas di Papua. Banyak pos OMSP yang memiliki fasilitas terbatas, seperti listrik, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini menurunkan kenyamanan dan daya tahan personel di daerah terpencil. Untuk mengatasinya, TNI AD berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan menambah insentif daerah khusus, menyediakan logistik tambahan, dan melakukan rotasi personel secara berkala agar beban kerja di wilayah berat dapat tersebar lebih merata.

Kendala terakhir adalah disinformasi dan propaganda digital yang menyudutkan operasi militer di Papua. Media sosial sering dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan, menggambarkan operasi OMSP sebagai bentuk kekerasan negara. Hal ini menghambat dukungan masyarakat terhadap kegiatan TNI. Untuk menjawab tantangan ini, TNI AD meningkatkan peran komunikasi sosial (komsos) dengan menggandeng tokoh agama, guru, dan jurnalis lokal untuk menyebarkan informasi yang benar mengenai tujuan OMSP.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah Papua merupakan implementasi konkret dari peran TNI sebagai alat negara yang tidak hanya berfungsi untuk pertahanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan dan stabilitas nasional. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi OMSP di Papua menunjukkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

bahwa TNI AD telah menjalankan fungsi perbantuan kepada pemerintah daerah dengan baik, terutama dalam mendukung keamanan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kehadiran negara di daerah terpencil. Pelaksanaan kebijakan ini terbukti mampu menjembatani sinergi antara fungsi pertahanan dan pembangunan melalui pendekatan teritorial yang humanis dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan OMSP di Papua dapat dikatakan efektif secara operasional, namun masih menghadapi tantangan koordinasi dan infrastruktur. Kendala utama seperti medan berat, minimnya jaringan komunikasi, dan keterbatasan fasilitas di wilayah pedalaman dapat diatasi dengan langkah-langkah adaptif yang telah dilakukan TNI AD. Melalui pendekatan sosial, kultural, dan pembangunan teritorial, OMSP bukan hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen nation building yang memperkuat kehadiran negara dan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan TNI.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis lapangan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan OMSP di wilayah Papua dan daerah lain dengan karakteristik serupa. Pertama, penguatan sinergitas antarinstansi perlu ditingkatkan melalui sistem koordinasi terpadu antara TNI, pemerintah daerah, dan lembaga sipil. Kedua, pemerintah pusat dan TNI perlu memperkuat infrastruktur dan dukungan logistik di wilayah operasi OMSP. Ketiga, perlu dilakukan penguatan strategi komunikasi sosial (komsos) TNI perlu terus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam kegiatan sosial untuk membangun kepercayaan dan mengikis pengaruh disinformasi yang menyudutkan peran militer di Papua. Keempat, modernisasi sistem informasi dan pelaporan operasi harus menjadi prioritas. Kelima, aspek kesejahteraan personel perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan. Kebijakan rotasi berkala, pemberian insentif daerah khusus, serta dukungan moral bagi prajurit dan keluarganya harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan OMSP.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Sehingga pelaksanaan OMSP di Papua hendaknya terus diarahkan sebagai bentuk operasi humanis dan kolaboratif. Peran TNI harus dipandang bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan sosial dan pembangunan manusia. Dengan memperkuat kerja sama antara militer, pemerintah, dan masyarakat, Papua dapat menjadi contoh nyata keberhasilan integrasi antara pertahanan dan pembangunan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**REFERENSI**

- Aditya, R., & Suryaningrum, D. (2022). Analisis implementasi kebijakan operasi militer selain perang dalam penanggulangan bencana di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v12i1.2022>
- Arifin, M., & Hidayat, R. (2021). Sinergi militer dan sipil dalam mendukung stabilitas keamanan daerah perbatasan Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 289–307. <https://doi.org/10.22146/jkn.v27i3.2021>
- Badan Pusat Statistik Papua. (2023). *Papua dalam angka 2023*. Jayapura: BPS Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewi, L. K., & Wibowo, T. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan publik di bidang pertahanan nonmiliter. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(2), 120–138. <https://doi.org/10.22304/jkpi.v10i2.2022>
- Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. (2022). *Laporan tahunan pelaksanaan OMSP TNI 2022*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Hutabarat, Y., & Purnomo, A. (2020). Sinergi pertahanan dan pembangunan wilayah dalam implementasi OMSP di daerah konflik. *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*, 5(2), 145–163. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jsb72>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Buku putih pertahanan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI. <https://www.kemhan.go.id>
- Lemhannas RI. (2022). *Laporan keamanan dalam negeri 2022: Stabilitas Papua dan wilayah perbatasan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nasution, E., & Yulianto, R. (2023). Dinamika sosial dan pendekatan humanis dalam pelaksanaan operasi militer selain perang di Papua. *Jurnal Ilmu Pertahanan dan Keamanan*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.31000/jipk.v9i1.2023>
- Riyanto, S., & Ardhana, I. (2021). Implementasi kebijakan pertahanan negara melalui operasi militer selain perang. *Jurnal Kajian Strategis Pertahanan*, 8(2), 112–129. <https://doi.org/10.33369/jksp.v8i2.2021>
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- TNI Angkatan Darat. (2022). *Profil Kodam XVII/Cenderawasih dan pelaksanaan OMSP di wilayah Papua*. Jayapura: Pusat Penerangan TNI AD.
- Wahyudi, D., & Prabowo, S. (2020). Implementasi pendekatan teritorial TNI dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal. *Jurnal Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, 15(2), 88–106. <https://doi.org/10.22146/jpkn.v15i2.2020>
- Warwick, D. P. (1975). *A theory of public bureaucracy: Politics, personality, and organization in the state department*. Cambridge, MA: Harvard University Press.